

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang terus berkembang menuju kemajuan yang memerlukan kontribusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan ini melibatkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Pembangunan di suatu wilayah menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan secara bertahap dan terencana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Oleh karena itu pembangunan yang harus dilakukan harus bersifat komprehensif mencakup aspek fisik secara pengembangan sumber daya manusia.

Pembangunan tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara jasmani maupun rohani. Jika pembangunan hanya mengutamakan satu aspek maka akan timbul ketimpangan dan tidak akan berhasil mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil apabila dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah sehingga tercapai pembangunan yang menyeluruh. Perlu diingat bahwa pembangunan saat ini dipengaruhi oleh semangat reformasi yang

¹ Ahmad Yani Kosali, SE., SH., MM. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Sako Palembang* (Sumatera Selatan: Media Ekonomi dan kewirausahaan, 2020)

menekankan demokratisasi.² Oleh karena itu penting untuk memiliki visi yang sama bahwa pembangunan nasional harus dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat swasta dan juga pemerintah guna mencapai masyarakat yang mandiri maju dan sejahtera dan adil.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa hal yang harus dilakukan sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2008), khususnya di tingkat Kelurahan (PP No. 73 Tahun 2005). Salah satunya adalah memperkuat peran lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kota maupun desa, agar mereka dapat berpartisipasi dalam program pembangunan guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.³

Dasar pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga pemberdayaan Kemasyarakatan. LPM Kelurahan berfungsi sebagai mitra pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 8 yang menetapkan tugas LPM di tingkat desa maupun Kelurahan.⁴ Tugas-tugas tersebut meliputi penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong serta melaksanakan dan mengawasi pembangunan untuk memastikan tugas dan fungsi berjalan dengan baik.

² Depika Mulia, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras*, Skripsi, 2022, h.1

³ Depika Mulia, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras*, Skripsi, 2022, h.2

⁴ PerMendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga pemberdayaan masyarakat akan melaksanakan kegiatan melalui musyawarah rencana pembangunan yang melibatkan seluruh warga masyarakat serta perangkat LPM sebagai fasilitator pembangunan. Dalam musyawarah ini berbagai aspirasi masyarakat akan dibahas secara bersama-sama. Kegiatan tersebut diadakan di tingkat Kelurahan untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan dengan tujuan agar hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama bukan hanya untuk pihak-pihak tertentu saja.⁵

Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah sebuah organisasi yang lahir oleh masyarakat dan untuk masyarakat. LPM berfungsi untuk menampung serta mengimplementasikan aspirasi dan inisiatif masyarakat, serta bertindak sebagai koordinator dalam proses perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.

Seperti halnya di Kelurahan Bungus Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Bungus Teluk Kabung Utara mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam perannya LPM telah menjalankan beberapa bentuk pembangunan di Bungus Teluk Kabung Utara seperti adanya jalan lingkar

⁵ Depika Mulia, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras*, Skripsi, 2022, h.

yang mana jalan ini bisa sebagai salah satu sarana pembangunan jalan lingkar yang digunakan oleh masyarakat di sana sebagai alternatif untuk menuju ladang mereka dan juga memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Selain jalan lingkar, LPM juga berperan melaksanakan pembangunan fisik yang lain seperti saluran irigasi untuk persawahan yang mana saluran tersebut berguna untuk mengaliri air ke sawah. Selanjutnya program air bersih yang mana program ini telah berjalan di RT 02 RW 03 dan sebagian rumah masyarakat sudah mendapat air bersih yang layak, di samping itu program air bersih selain berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari juga berdampak pada kesehatan masyarakat Kelurahan Teluk Kabung Utara.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan perannya tidak mungkin dapat berjalan sendiri dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembangunan, tetapi diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Kelurahan. Terjalinnya kerjasama yang baik diharapkan akan melahirkan program-program pembangunan yang baik pula.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Bulkianur, S.Sos, selaku ketua dari LPM Kelurahan Bungus Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yaitu sebagai wadah partisipasi

masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Kegiatan merumuskan aspirasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan biasanya dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan yang mana melibatkan LPM dan perangkat kelurahan di Kelurahan Bungus Teluk Kabung Utara. Sejauh ini kita sudah ada beberapa perencanaan pembangunan yang terlaksana yaitu pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, pembangunan jembatan penghubung di Lubuk Hitam, dan program air bersih”.

Berdasarkan fakta lapangan yang penulis temukan di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung adanya pembangunan fisik yang telah terlaksana namun ada beberapa yang belum optimal dalam pelaksanaannya, seperti pembuatan jalan lingkar yang dilakukan di dekat pesisir pantai, adanya pembangunan saluran irigasi di dekat sawah masyarakat dan sekitar rumah warga yang ada di Kelurahan Teluk Kabung Utara. Lalu program air bersih telah terlaksana akan tetapi belum seluruh masyarakat mendapatkannya karena ada tahapan-tahapannya. Dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Bungus Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung tentu adanya peran dari pemerintah setempat dan tidak terlepas dari peran LPM disana.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, di sini penulis melihat ada beberapa fenomena yang menunjukkan adanya bentuk

dari peran LPM seperti LPM membantu masyarakat dalam merancang perencanaan pembangunan, mengajak masyarakat dalam gotong royong serta membantu dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. Selain LPM dan pemerintah yang merawat hasil pembangunan masyarakat juga harus ikut dalam hal tersebut, jadi motivasi yang seharusnya yang dilakukan oleh LPM untuk menyadarkan masyarakat belum optimal. Di samping itu belum optimal upaya LPM dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di kelurahan Bungus Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik di Bungus Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung".

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik di Bungus Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terjadi ketimpangan siuran, maka penulis membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana LPM sebagai motivator dalam pembangunan fisik di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung?
2. Bagaimana peran LPM sebagai fasilitator dalam pembangunan fisik di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung?
3. Bagaimana peran LPM sebagai mediator dalam pembangunan fisik di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat bagaimana peran LPM sebagai motivator dalam pembangunan fisik di Bungus Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
2. Untuk melihat bagaimana peran LPM sebagai fasilitator dalam pembangunan fisik di Bungus Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
3. Untuk melihat bagaimana peran LPM sebagai mediator dalam pembangunan fisik di Bungus Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung..

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya, berikut kegunaannya :

1. Kegunaan Institusi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan pertimbangan dalam proses mengambil kebijakan serta bahan evaluasi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik di Kelurahan Bungus Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
2. Kegunaan Praktis. Penelitian ini dilakukan guna sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang:
 - a. Berguna untuk menambah Wawasan Ilmu Pengetahuan tentang bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Fisik di Kelurahan Bungus Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
 - b. Penelitian ini berguna untuk menghasilkan informasi dan bermanfaat sebagai masukan, koleksi Perpustakaan serta bahan Referensi bagi peneliti berikutnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , terutama di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

E. Penjelasan Judul

1. Peran

Menurut Merton peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status peran tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Perangkat peran merupakan kelengkapan dari hubungan yang berdasarkan pada peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tersebut.

Jadi, berdasarkan pengertian di atas peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah LPM sebagai lembaga kemasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bungus Teluk Kabung Utara, kecamatan Bungus Teluk Kabung.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah sebuah organisasi yang berkembang dari masyarakat dan untuk masyarakat berfungsi sebagai sarana bagi partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk mendorong peningkatan inisiatif dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan secara partisipatif.⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah organisasi, wadah yang

⁶ Ricky Marvil Mawitjere, Novie Pioh, Ventje Kasenda, “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No. 1, ISSN : 2337 –5736, (Universitas Sam Ratulangi: Eksekutif, 2018), hal, 4.

dibentuk prakasa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

3. Pembangunan Fisik

Menurut Effendi pembangunan fisik merupakan pembangunan daerah otonom badan eksekutif desa selain dituntut mampu memberikan pelayanan yang baik dan dilakukan secara profesional kepada masyarakat juga mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan desa serta kebaikan bersama satu pembangunan fisik atau infrastruktur akan tepat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang garis besar dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Menjelaskan dan menguraikan berbagai hal sebagai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Merupakan kerangka teori yang meliputi tentang Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pembangunan fisik

BAB III Merupakan metode penelitian yang akan
digunakan dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA Merupakan kumpulan referensi atau bahan
bacaan mengenai penulisan proposal skripsi ini

